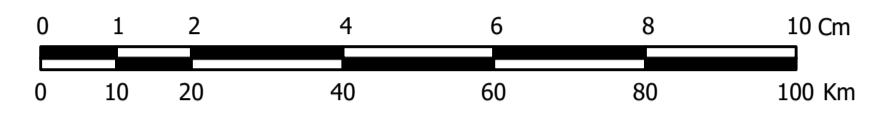


**PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
(REVISI III)**

Skala 1:1.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Spheroid : WGS 1984

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor : SK.744/MENLHK-PRTL/REN/PLA.0/1/2019  
Tanggal : 24 Januari 2019

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

*Sigit Hardwinarto*  
Sigit Hardwinarto  
NIP. 19610202 198603 1 003

**LOKASI INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL**

- Lokasi Indikatif Perhutanan Sosial
- Areal Perhutanan Sosial

**KETERANGAN :**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

**STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**

- Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
- Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Konservasi Perairan
- Hutan Produksi yang dapat dikonversi
- Hutan Lindung
- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Produksi Terbatas

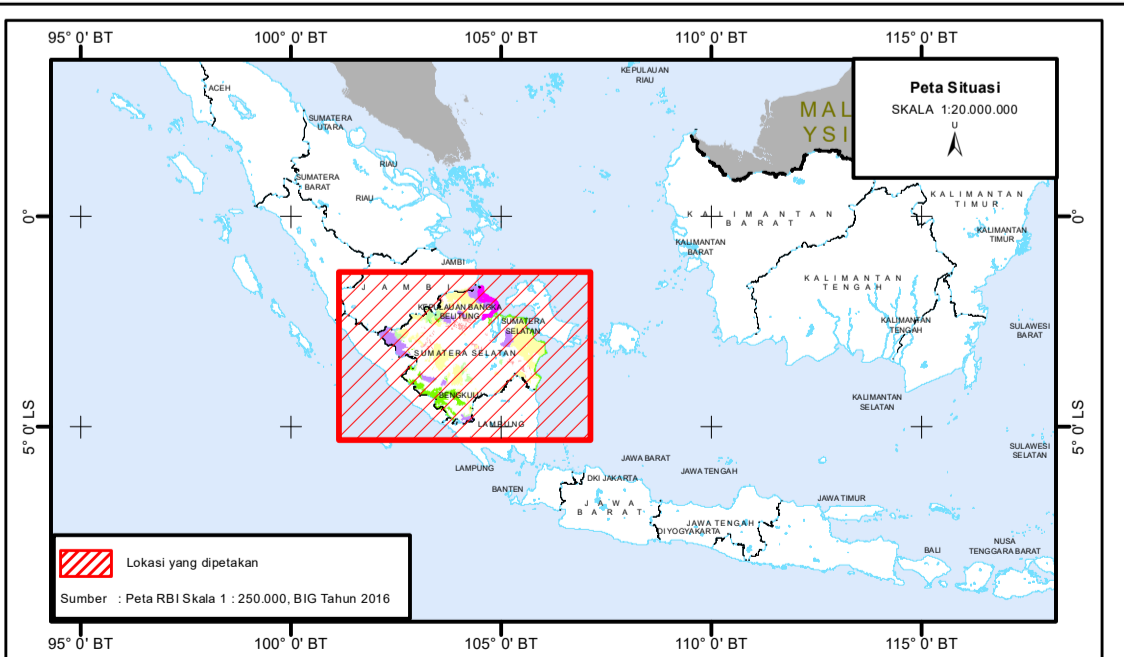
**DASAR PEMBUATAN PETA**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial tanggal 25 Oktober 2016

**SUMBER DATA :**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2017
2. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Di Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016)
3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Tahun 2016 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1853/MenLHK-PRTL/KUH/PLA.2/3/2017)
4. Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9246/MenLHK-PHP/KPH/PHL.0/12/2018)
5. Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017)
6. Data Pengesahan Penataan Hutan KPHL dan KPHP pada RHPJP sampai dengan Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Data Izin Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018
8. Masukan dari masyarakat atau usulan pemerintah daerah

Keterangan :  
Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2019